

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi Indonesia yang diproklamlirkan oleh Soekarno dan Moh.Hatta telah membawa bangsa ini menuju suatu era yang baru dimana Indonesia resmi menjadi sebuah negara. Sebagai sebuah negara yang baru tentu saja Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain bahwa negara Indonesia sudah berdiri dan siap untuk menjadi anggota dari komunitas internasional. Selain itu juga pada pasca kemerdekaan Indonesia dan berakhirnya Perang Dunia II, konstelasi politik dunia terbagi menjadi kekuatan besar antara Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Soviet). Banyak negara-negara di dunia ini pun tak lepas dari arus konstelasi tersebut, mereka berlomba untuk menjadi aliansi Blok Barat maupun Blok Timur.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, arah kebijakan politik dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses anti kolonialisme dan menentang segala bentuk penjajahan diatas dunia. Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pemerintah Indonesia dengan cerdas menggunakan strategi penggalangan kekuatan internasional. Para diplomat Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin tercapai tanpa dukungan internasional. Meskipun dilihat dari beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang relatif lemah sejak awal masa kemerdekaan hingga sekarang, namun kebijakan politik luar negerinya terus berusaha memainkan peranan yang relatif independen sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas aktif. Misalnya usaha mencapai perdamaian dunia ketika terjadi ketegangan antara dua raksasa dunia (Uni Soviet dan Amerika Serikat) Soekarno melancarkan politik bebas aktifnya dengan tidak memihak salah satu blok negara. Soekarno berpendapat bahwa untuk tercapainya perdamaian dunia bukan dengan jalan mengurangi ketegangan antara dua negara raksasa tersebut, mengusahakan pelucutan senjata, dan bukan pula dengan menghentikan percobaan senjata nuklir. Soekarno disini memfokuskan segenap perhatiannya pada issue "imperialisme dan kolonialisme sebagai ancaman perdamaian dunia.

Uni Soviet yang sebelumnya bernama Rusia memiliki sejarah kerjasama dan hubungan yang cukup unik dengan Indonesia, bila dibandingkan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Kedekatan ideologis antara Indonesia dengan Uni Soviet pada awal kemerdekaan Indonesia menjadi salah

satu alasan dari kedekatan Indonesia dan Uni Soviet. Bahkan setelah Uni Soviet Runtuh dan berganti menjadi Federasi Uni Soviet seperti sekarang hubungan bilateral kedua negara masih cukup baik seperti pada masa awal kemerdekaan Indonesia namun hubungan kedua negara masih sempit dan belum diperluas ke bidang-bidang lain diluar militer.

Kesamaan ideologi dan tekad untuk melawan kolonialisme dan imperialisme menjadi dasar dari hubungan yang harmonis. Presiden Indonesia pada masa itu, Soekarno, melakukan 4 kali mengunjungi Uni Soviet dan bertemu dengan Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet saat itu. Pada setiap pertemuannya selalu ada kerjasama ataupun kesepakatan yang dibangun antara dua negara baik untuk mengharmoniskan hubungan kedua negara bahkan sampai pada tahapan dukungan di forum-forum internasional. Khrushchev balas mengunjungi Soekarno pada tahun 1960, dengan maksud untuk memperluas bidang kerjasama antara kedua Negara. Hubungan Indonesia Uni Soviet pada masa ini menghasilkan SUGBK (Stadion Utama Gelora Bung Karno) dan masih banyak lagi hasil kerja sama yang dilakukan antara kedua negara. Hubungan Indonesia-Uni Soviet ini mulai menyusut pada pertengahan tahun 1960-an, dimana pada tahun 1965 terjadi tragedi politik di Indonesia dengan pemberontakan dari PKI. Uni Soviet yang memiliki keterhubungan dengan PKI merasakan akibatnya secara langsung karena setelah berkuasa orde baru hubungan ini mulai membeku.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet telah berlangsung sejak lama, Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Uni Soviet menjadi negara pertama yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dikarenakan Uni Soviet mendukung kelas pekerja di negara jajahan, seperti politik Uni Soviet yang menentang kolonialisme karena itulah Uni Soviet menjadi sekutu Indonesia. Kerjasama kedua negara terus berlanjut dalam berbagai bidang hingga sekarang dan seperti hubungan kerjasama pada umumnya yang mengalami pasang surut begitu juga hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet yang mengalami dinamika sejak Pra-Kemerdekaan, Pasca Kemerdekaan, Masa Orde Baru, hingga saat ini. Indonesia dan Uni Soviet membentuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik dan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bersedia untuk mengeksport kebutuhan pokok kepada pemerintah Uni Soviet. Tidak hanya itu, dalam hubungannya dengan negara Uni Soviet, pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama dalam bidang politik untuk

mendapatkan dukungan dari pihak luar negeri untuk mencegah adanya kaum kolonialisme kembali.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui seberapa bergunanya hutang dari Uni Soviet untuk pembangunan Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada periode demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959-1965 dengan alasan bahwa pada periode tersebut Indonesia masih terhitung negara yang baru merdeka sehingga dalam menjalankan pemerintahan perlu untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri mengingat gejolak politik Indonesia pada masa itu masih belum stabil yang ditandai dengan berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Selain itu, dalam hal pemerintahan, Indonesia juga perlu untuk melihat ataupun mengadaptasi sistem pemerintahan dari negara lain sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju. Maka dari itu penelitian ini diarahkan untuk meneliti hubungan Indonesia Uni Soviet (Uni Soviet) dengan judul: **Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia dan Uni Soviet pada Tahun 1959-1965.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “masa awal kemerdekaan keadaan politik terutama dalam hal pengakuan kedaulatan dan ekonomi negara Indonesia masih belum stabil, sehingga Indonesia membutuhkan hubungan yang saling menguntungkan dari negara Uni Soviet sebagai negara pendukung untuk memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat”. Dari permasalahan tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia dan Uni Soviet pada Tahun 1959-1965?
2. Bagaimana hubungan politik antara Indonesia dan Uni Soviet pada Tahun 1959-1965?
3. Bagaimana hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Soviet pada Tahun 1959-1965?
4. Bagaimana dampak dari hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia dan Uni Soviet pada Tahun 1959-1965?

C. Tujuan Kajian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan latar belakang terjadinya hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Soviet pada tahun 1959-1965.
2. Menguraikan hubungan politik antara Indonesia dengan Uni Soviet pada tahun 1959-1965.
3. Menguraikan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Soviet pada tahun 1959-1965.
4. Menguraikan dampak dari hubungan politik antara Indonesia dengan Uni Soviet pada tahun 1959-1965.

D. Batasan Konsep dan Istilah

1. Batas Konsep

Dalam melakukan sebuah penelitian sejarah, batasan konsep dipandang perlu untuk memudahkan dalam melakukan sebuah penelitian sejarah. Batasan konsep dapat juga digunakan untuk mengenali konsep-konsep yang hendak dikaji dalam penelitian sejarah, targetnya agar dalam prosedur penelitian rancangan yang hendak di telaah tidak keluar dari koridor rancangan yang hendak dikaji sehingga sebuah penelitian dapat dipahami dengan mudah serta terlihat jelas batasan penelitian yang akan dikaji. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan konsep yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan Internasional

Hubungan internasional sendiri bisa diartikan sebagai bentuk pola interaksi atau hubungan dari dalam negeri ke luar negeri dengan berbagai macam kepentingan baik politik, hukum, ekonomi, budaya, keamanan dan masih banyak lagi.

Dalam bukunya *Methodology in the Study of International Relations*, seperti yang dikutip oleh Wiriaatmadja (2007) mencatat bahwa istilah hubungan internasional mempunyai beberapa arti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
- 2) Sejarah baru dari politik internasional.
- 3) Semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia negara lain.
- 4) Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (district disiplin), atau dengan kata lain bukan merupakan cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa hubungan internasional memiliki banyak arti diantaranya ada empat arti yang dapat disejajarkan dengan pengertian hubungan internasional. Hubungan ini ternasional dapat diartikan sebagai suatu kajian yang mencakup aspek-aspek internasional. Hal ini berarti hubungan internasional terjadi ketika ada dua atau lebih negara yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, hubungan internasional juga memiliki kaitan dengan politik internasional dimana dalam menjalin hubungan terdapat isu-isu politik yang terjadi diantara negara yang saling bekerjasama. Istilah hubungan internasional juga menyangkut pola interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sholeh (2017) bahwa:

Hubungan Internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat lingkungan, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan trik berfikir manusia.

Teori di atas menggambarkan bahwa hubungan Internasional mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, melibatkan komunikasi dan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang berada dilintas negara. Pola hubungan internasional ini juga mencakup aspek-aspek kehidupan lainnya bagaimana suatu bangsa saling mencapai kesepakatan dan bersatu untuk membentuk kekuatan negara. Hubungan internasional adalah interaksi antara 2 negara atau lebih yang saling menguntungkan dengan landasan yang berbeda di setiap negara guna mewujudkan tujuan bersama. Maksudnya, hubungan internasional merupakan kerja sama antara 2 negara atau lebih dan menguntungkan masing-masing negara yang terlibat dengan dilandasi tujuan atau aturan tertentu untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati.

Dari pengertian tersebut, kita bisa menarik garis besarnya bahwa Hubungan Internasional menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara. selain dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara melalui bentuk kerja sama, hubungan internasional juga memiliki beberapa manfaat (Bakry, U. S. 2017), antara lain:

- 1) Mempererat hubungan antar negara. Jadi dapat menjauhkan negara dari perselisihan dengan negara lain.
- 2) Saling membantu dan bekerjasama di semua bidang untuk mencapai suatu tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya oleh negara yang bersangkutan.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara.

Pendapat di atas menjelaskan ada tiga manfaat dari hubungan internasional yang terjalin antar negara. Manfaat tersebut yaitu dapat memperlancar hubungan antara negara yang bekerjasama dan menjauhkan negara dari perselisihan. Adanya hubungan internasional juga menjamin ketertiban dan keamanan yang lebih baik. Hubungan internasional juga tidak luput dari kerjasama suatu negara diberbagai bidang sehingga hal ini dapat membantu negara untuk mencapai tujuan. Kerjasama yang terjalin dalam hubungan internasional juga bermanfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi negara. Kegiatan ekspor dan impor barang tentu akan menambah devisa negara dan memperbaiki pendapatan rakyat.

b. Politik

Konsep politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Hubungan dan kerjasama antara satu negara dengan negara lain perlu dilakukan karena negara yang berdaulat dan merdeka membutuhkan bantuan, dorongan, dukungan, dan kerjasama dengan negara lain. Seperti halnya dengan Indonesia, Negara Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia untuk membentuk aliansi maupun kerjasama dalam perdagangan. Hal ini tentunya harus terdapat kebijakan politik luar negeri agar kedua belah pihak yang saling bekerjasama mendapatkan keuntungan masing-masing. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Budiarjo (2005:12) bahwa "Politik Luar Negeri sebagai Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya".

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa Politik Luar Negeri memiliki arti suatu kebijakan yang diterapkan oleh suatu Negara dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini suatu kelompok ataupun Negara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Politik luar negeri dalam konteks ini adalah suatu Negara yang menerapkan kebijakan yang mengatur hubungan negara tersebut dengan negara lain baik itu negara tetangga maupun negara-negara di dunia. Tujuan dari penerapan kebijakan politik luar negeri terdiri dari berbagai tujuan diantaranya adalah membangun kerjasama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjalin hubungan diplomasi, politik, maupun ketata negaraan, dan mendapatkan dukungan dari negara lain. Mappa Nasrun (2010:98) mengatakan :

Kebijakan Luar Negeri suatu Negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri lahir dari suatu keadaan yang terjadi baik di dalam maupun di luar suatu negara itu, termasuk keadaan dan perkembangan negara serta kondisi politik dari seluruh negara. Hal ini dapat berarti bahwa adanya kebijakan politik luar negeri suatu negara memandang bahwa perkembangan negara itu membutuhkan campur tangan dari negara lain. Kondisi politik di suatu negara dapat terpengaruh dengan kondisi politik negara lain, karena negara satu dengan negara lain akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Misalnya dalam bidang perekonomian, terdapat ekspor dan impor, bidang politik ada berbagai perjanjian dan kerjasama antara negara satu dengan negara lain, dan sebagainya. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Childs (2019: 2) yang mengungkapkan bahwa :

Politik Luar Negeri adalah pokok-pokok yang menjadi dasar hubungan luar negeri suatu Negara. Hubungan tersebut dapat bersifat regional dengan Negara tetangga atau dengan Negara yang berada dalam satu wilayah, dan hubungan Internasional ; Negara-Negara seluruh dunia dan organisasi-organisasi yang ada.

Terkait dengan teori di atas dapat dijelaskan bahwa politik luar negeri mengacu pada hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Hubungan suatu negara dengan negara lain, terdapat suatu istilah hubungan regional, dan hubungan internasional. Hubungan negara yang bersifat regional adalah suatu hubungan antara negara satu dengan negara yang lain yang masih dalam satu wilayah misalnya Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan Thailand yang sama-sama masih satu wilayah yaitu Asia Tenggara. Sedangkan hubungan negara yang bersifat internasional adalah hubungan antara negara satu dengan negara lain yang ada di dunia baik dalam satu wilayah maupun berbeda wilayah, misalnya hubungan antara Indonesia dengan negara lain di dunia melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebagaimana hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kusmayadi (2020) menjelaskan bahwa:

Politik luar negeri dijalankan oleh Soekarno dilakukan demi kepentingan nasional. Pada era pemerintahannya, kepentingan nasional utama bagi bangsa Indonesia adalah pengakuan akan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa (*nation building*). Kepentingan nasional tersebut diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri, tujuannya mencari dukungan juga pengakuan terhadap kedaulatan bangsa, serta

untuk menunjukkan karakter bangsa Indonesia kepada negara-negara lain. Politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Lebih sederhananya, politik dapat dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu kebijakan yang diterapkan oleh suatu Negara dalam mencapai tujuan. Suatu kelompok ataupun Negara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Politik luar negeri dalam konteks ini adalah suatu Negara yang menerapkan kebijakan yang mengatur hubungan negara tersebut dengan negara lain baik itu negara tetangga maupun negara-negara di dunia.

c. Ekonomi

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu masyarakat dapat dikatakan baik apabila ia dapat memenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok yang terdiri dari sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Menurut Elsi (2011: 2) menyebutkan bahwa “Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Ekonomi adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, misalnya bekerja, berdagang, dan sebagainya. Sebagaimana hal ini juga sesuai dengan pernyataan Iskandar (2018: 1) bahwa:

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Sesuai dengan pernyataan Rivai dan Buchari (2019: 27) bahwa

Kebutuhan dasar manusia dapat digolongkan atas lima macam atas dasar kekuatan potensi dan desakan urgensinya, yaitu: Kebutuhan dasar manusia sehari-hari seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bercampur dengan kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan untuk memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan atau perlindungan dari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan kehidupan dengan gejala aspeknya. Kebutuhan untuk menyukai dan disukai, disayangi dan menyayangi, dicintai dan mencintai, kebutuhan untuk bergaul, berkelompok dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi anggota dari kelompok pergaulan yang lebih besar. Kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan. Kebutuhan untuk menimbulkan kebangsaan, keagungan, kekaguman, sebagai orang yang mampu dan berhasil mewujudkan potensi bakatnya dengan hasil potensi yang luar biasa.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ekonomi merupakan suatu bidang yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Definisi Ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi sering dipelajari dan diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Dalam hal ini maka ekonomi merupakan aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Senada dengan pendapat tersebut Saputra (2015) juga mengungkapkan bahwa

Ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggabungan seluruh sumber yang memang dianggap efisien dan efektif. Ekonomi juga merupakan sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya supaya mencapai tujuannya (Saputra, 2015).

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan rumah tangga yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Perekonomian dalam suatu wilayah atau negara sangat penting karena dapat menentukan kemajuan dan pembangunan bangsa.

d. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otoritas dan menjadi

bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Senada dengan pendapat tersebut, Argenti (2017:10) juga menjelaskan bahwa:

Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kata demokras telah digunakan oleh presiden pertama yakni Soekarno untuk menyebutkan istilah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi berarti pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat dengan maksud segala pengaturan pemerintahan didasarkan oleh aspirasi rakyat. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian dijadikan suatu kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan pendapat tersebut Feith (2005: 98) juga menjelaskan bahwa:

Demokrasi terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi, dalam artian lain negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa era demokrasi terpimpin merupakan suatu masa pemerintahan yang dijalankan oleh negara Indonesia pada awal 1959 hingga 1966. Pada masa ini pemerintah secara resmi menggunakan sistem pemerintahan demokrasi untuk menerapkan kebijakan politik, dimana presiden merupakan lembaga tertinggi negara. Dalam sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden.

Demokrasi Terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai Konsepri Presiden 1957. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, di antaranya: Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.

Membentuk kabinet gotong royong berdasarkanimbangan kekuatan masyarakat, yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Sesuai dengan pendapat Hamid (2012: 17) bahwa

Tujuan sistem Demokrasi Terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Sistem Demokrasi Terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Sukarno.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin istilah atau sebutan untuk suatu sistem pemerintahan masa orde lama yang berlangsung pada tahun 1959-1966 yang pada masa itu dipimpin oleh Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, negara Indonesia merupakan negara yang belum lama merdeka, sehingga dalam sistem politik pemerintahannya masih perlu untuk belajar dari negara lain yang memiliki ideologi yang sama. Pada masa demokrasi terpimpin ini kondisi politik dan ekonomi negara masih belum stabil paska kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Oleh sebab itu, pada masa demokrasi terpimpin ini banyak kebijakankebijakan yang diutamakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

e. Uni Soviet

Uni Soviet atau USSR atau Uni Republik Sosialis Soviet, disingkat URSS adalah negara sosialis yang pernah ada antara tahun 1922–1991 di Eurasia. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis hingga 1990. Sesuai dengan pendapat Dahlan (2018) bahwa:

Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis-komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992. Federasi tersebut bernama *Republics Socialist Soviet (RSS)*. Awalnya, federasi RRS ini hanya terdiri atas empat negara saja, yakni *Russian Soviet Federated Socialist Republic* atau Uni Soviet SFSR, Transcaucasia SFSR, Ukrainian SSR, dan Belorussian SSR.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa negara Uni Soviet merupakan suatu negara yang dulu bernama Rusia. Pada awalnya negara Uni Soviet terdiri dari empat negara, setelah itu Uni Soviet berkembang menjadi lima belas negara yang berdiri sendiri. Uni Soviet merupakan negara federasi yang memiliki sistem

pemerintahan sosial-komunis. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kusmayani (2019) bahwa:

Berawal dari empat negara, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara (pada tahun 1956) yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Byelorussia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Uni Soviet, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis, hingga tahun 1990. Meskipun sebenarnya, Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Uni Soviet merupakan gabungan dari negara-negara yang memiliki paham sosial komunis, sehingga Uni Soviet disebut dengan negara federasi. Seperti halnya Indonesia, Uni Soviet memiliki sifat anti kolonialis sehingga dalam hal ini Uni Soviet merupakan negara yang anti dengan penjajahan. Ideologinya tersebut hampir memiliki kesamaan dengan Indonesia, sehingga pada masa itu sebelum Indonesia tergabung dalam anggota PBB, Uni Soviet sangat mendukung Indonesia untuk bergabung menjadi anggota PBB.

2. Batasan Istilah

- a. Hubungan internasional sendiri bisa diartikan sebagai bentuk pola interaksi atau hubungan dari dalam negeri ke luar negeri dengan berbagai macam kepentingan baik politik, hukum, ekonomi, budaya, dan keamanan.
- b. Istilah Politik merupakan reaksi terhadap perubahan lingkungan Internasional dalam bentuk strategi dan rencana yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan suatu Negara.
- c. Bidang ekonomi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Soviet.
- d. Demokrasi terpimpin terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
- e. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis-komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992.

E. Kegunaan Kajian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna secara teoritis untuk mengembangkan kajian keilmuan dibidang sejarah nasional Indonesia terkait dengan hubungan politik Indonesia dengan Uni Soviet sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Untuk melaksanakan salah satu Tridharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu untuk ilmu pengetahuan sosial. Penulisan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dalam penyusunan tugas akhir pada mahasiswa pendidikan Sejarah.

b. Bagi Masyarakat/pembaca

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan Indonesia dan Uni Soviet pada masa demokrasi terpimpin.

F. Metode Kajian

1. Pemilihan Topik

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Topik yang dipilih dalam penelitian ini adalah terkait hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet dalam bidang politik dan Ekonomi pada Tahun 1959-1965. Topik ini dipilih dengan alasan membahas situasi politik pada era demokrasi terpimpin perlu untuk dilakukan. Hal ini karena Indonesia pada masa awal kemerdekaan membutuhkan berbagai bantuan dan dukungan dari luar negeri baik untuk pengakuan atau kerjasama lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Heuristik

Teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Heuristik, maksudnya ialah tahap untuk mencari, menemukan, dan juga mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar bisa mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Kegiatan heuristik dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber kajian dari Internet, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro, Perpustakaan Daerah Kota Metro, dan perpustakaan Provinsi Lampung. Hasil penelusuran sumber kajian yang berhasil peneliti kumpulkan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1: Keterangan Sumber Data

No	Jenis Sumber	Keterangan
1	Sejarah Indonesia modern	Asli
2	Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini	Asli
3	Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.	Asli
4	Sahabat lama Era Baru 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia - Uni Soviet	Asli
5	Komunikasi Politik Indonesia-Uni Soviet	Asli
6	Hubungan Indonesia dengan negara lain	Asli
7	Masa Demokrasi Terpimpin	Asli
8	Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri	Asli
9	Komunikasi Politik Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet Dalam Meredam Politik Identitas	Asli
10	Dari Uni Soviet hingga Uni Soviet	Asli
11	Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam Era Stalin dan Kruschev 1945-1964	Asli
12	Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Uni Soviet: Dimensi dan Prospek	Asli

b. Studi Kepustakaan

. Pelaksanaan studi kepustakaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan literatur atau artikel yang mendukung dan relevan dengan judul yang diteliti yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Mendatangi Perpustakaan yang menjadi tempat penelitian. Dalam hal ini perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Metro, dan Perpustakaan Daerah Kota Metro (Dispusarda)
 - 2) Mencari literatur terkait dengan hubungan politik Indonesia dengan Uni Soviet di rak perpustakaan atau menanyakan langsung pada petugas perpustakaan.
 - 3) Melakukan pengumpulan data melalui situs internet untuk mencari jurnal-jurnal yang relevan. Dalam pengumpulan data juga meliputi kegiatan membaca buku
- b. Menggaris bawahi poin-poin penting dan relevan dengan kajian yang diteliti yaitu hubungan politik Indonesia dengan Uni Soviet
- c. Mengutip sebagian dari kalimat atau paragraf terkait dengan hubungan politik Indonesia dengan Uni Soviet yang ada di buku maupun di jurnal, kemudian mengubahnya kedalam kalimat tidak langsung.

3. Keabsahan Pengumpulan Data

Suatu penelitian agar dapat mencapai hasil yang optimal maka harus didukung oleh data yang tepat. Kritik sumber dapat disebut juga sebagai pengujian terhadap data yang digunakan dalam penelitian sejarah.

a. Kritik Ekstern

Kritik Eksternal adalah penelitian untuk menguji otentisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Sumber yang asli biasanya waktu dan tempat diketahui karna semakin luas maka semakin dapat dipercaya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa kritik eksternal adalah suatu langkah dalam sebuah penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji keaslian dari suatu sumber sejarah. Sumber sejarah harus melalui pengujian terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Sasaran kerja kritik eskternal

adalah uji otentisitas (keaslian) suatu sumber atau dokumen. Uji otentisitas (keaslian) sumber atau dokumen sejarah dapat dilakukan melalui:

1. Determinasi pengarang/Informan dan tanggal
2. Pemalsuan
3. Restorasi Teks

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kritik Ekstern digunakan untuk menguji otentitas (keaslian) suatu sumber, Adapun langkah-langkah kritik ekstern antara lain:

- 1) Menguji didalam sumber apakah Nama pengarang dan tanggal yang tercantum adalah benar dan asli.
- 2) Menguji keaslian sumber atau dokumen agar terhindar dari sumber hasil dari plagiatisme.
- 3) Mengecek antara buku dan judul penelitian tersebut relevan.

Tabel 2. Kritik Ekstern Data “Hubungan Indonesia Dan Uni Soviet Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”

No	Tema Yang Dibahas	Sumber Data/Pengarang	Keterangan
1	Sejarah Indonesia modern	Hapsari	Asli
2	Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini	Widiadmojo	Asli
3	Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.	Fitri Saputri	Asli
4	Sahabat lama Era Baru 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia - Uni Soviet	Lebang, T	Asli
5	Komunikasi Politik Indonesia-Uni Soviet	Silalahi, P.R	Asli
6	Hubungan Indonesia dengan negara lain	Ricklefs, M.C	Asli
7	Masa Demokrasi Terpimpin	Adi Sudirman	Asli
8	Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri	Suffri Yusuf	Asli
9	Komunikasi Politik Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet Dalam Meredam Politik Identitas	Zahrotunnimah	Asli
10	Dari Uni Soviet hingga Uni Soviet	Andi Saputra	Asli
11	Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam Era Stalin dan Krushev 1945-1964	Fahrurodji, A.	Asli

No	Tema Yang Dibahas	Sumber Data/Pengarang	Keterangan
12	Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Uni Soviet: Dimensi dan Prospek	HW Bachtiar	Asli

b. Kritik Intern

Kritik Internal adalah uji kebenaran mengenai informasi suatu dokumen, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daliman (2012:72) sebagai berikut “Kritik Intern ialah ingin mempertahankan, apakah isi informasi yang terkandung dalam suatu dokumen benar dan dapat dipercaya, *kredibel* dan *reliable*. Sebagai suatu kritik, kritik internal lebih atau *higher*”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa kritik intern merupakan suatu alat untuk menguji suatu kebenaran sumber data yang berasal dari kritik ekstern, sehingga peneliti memperoleh sumber data yang dapat dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam kegiatan penelitian ini sasaran kerja kritik internal adalah uji kredibilitas informan atau pengarang sumber dan dokumen, adapun langkah-langkah dalam kritik intern sebagai berikut, Daliman (2012: 73):

- a. Membaca dan mempelajari suatu sumber data untuk menyesuaikan isi dari sumber data dengan peristiwa yang tertuang didalam buku.
- b. Mengecek kebenaran dan kesesuaian antara tanggal dari buku dengan peristiwa yang tertuang didalam buku.
- c. Kolaborasi, kontradiksi dan pengukuran.

Tabel 3. Kritik Intern Data “Hubungan Indonesesia Dan Uni Soviet Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”

No	Tema Yang Dibahas	Konsep yang dibahas	Halaman	Keterangan
1	Sejarah Indonesia modern	Kondisi awal Indonesia pasca merdeka	4-9	Asli
2	Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini	Politik Indonesia awal kemerdekaan	30-37	Asli
3	Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.	Hubungan diplomatik Indonesia awal kemerdekaan	1-7	Asli

No	Tema Yang Dibahas	Konsep yang dibahas	Halaman	Keterangan
4	Sahabat lama Era Baru 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia - Uni Soviet	Hubungan politik Indonesia-Uni Soviet	101-125	Asli
5	Komunikasi Politik Indonesia-Uni Soviet	Hubungan politik Indonesia-Uni Soviet	98-105	Asli
6	Hubungan Indonesia dengan negara lain	Indonesia-Uni Soviet, persamaan Ideologi	56-62	Asli
7	Masa Demokrasi Terpimpin	Kondisi politi masa demokrasi terpimpin 1945-1966	1-15	Asli
8	Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri	Politik Luar Negeri Indonesia	86-91	Asli
9	Komunikasi Politik Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet Dalam Meredam Politik Identitas	Kerjasama politik Indonesia-Uni Soviet	17-40	Asli
10	Dari Rusia hingga Uni Soviet	Awal mula hubungan Indonesia-Uni Soviet	1-18	Asli
11	Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam Era Stalin dan Krushev 1945-1964	Persahabatan Inonesia dengan Uni Soviet	121-146	Asli
12	Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Uni Soviet: Dimensi dan Prospek	Hubungan Indonesia dan Uni Soviet sosial, ekonomi, politik, budaya	890-900	Asli

4. Metode Analisis Data

Dalam proses suatu penelitian setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa kebenarannya. Untuk hal tersebut langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data antara lain:

a. Interpretasi

Interpretasi adalah sebuah penafsiran dari suatu fakta sejarah. Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa interpretasi adalah suatu langkah dalam sebuah penelitian sejarah yaitu dengan menafsirkan suatu fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti sejarah agar teruji validitas

dan realibilitasnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan interpretasi data, peneliti hendaknya melakukan:

- 1) Membaca sumber data yang relevan dengan judul penelitian
- 2) Melakukan kritik ekstern dan kritik intern.
- 3) Mengecek kesesuaian antara sumber data dengan judul penelitian yang akan dibahas.

b. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi yakni tahapan penulisan sejarah. Keberhasilan (signifikasi) semua fakta yang dijarah melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi.

Historiografi merupakan suatu pandangan sejarawan terhadap suatu peristiwa sejarah yang dituangkan dalam sebuah tulisan dengan kejelasan, kekuatan, dan ekspresi bahasa yang baik ditampilkan oleh sejarawan. Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi". Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan historiografi data, peneliti hendaknya melakukan:

- 1) Pembaca yang ingin dituju (*Audiens*)
- 2) Apa yang harus ditulis
- 3) Bentuk atau kategori penulisan: deskriptif, naratif dan analitik
- 4) Gaya penulisan
- 5) Sruktur penulisan dan perangkat ilmiah

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa historiografi merupakan suatu langkah terakhir dalam sebuah penelitian sejarah. Menggabungkan dan mengkomunikasikan hasil dari tahap-tahap penelitian sejarah sebelumnya yaitu Heuristik, Verifikasi, dan Interpretasi.

G. Kajian Relevan

Dalam Penulisan sejarah ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep yang didapat dari penulisan sejarah terdahulu, baik dalam sebuah bentuk referensi buku cetak, artikel jurnal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam sebuah penulisan sejarah. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan kajian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Fahrurodji (2017) yang berjudul “Dari *Druzhba* ke *Mirnoye*: Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam era Stalin dan Kruschev, 1945-1964”, Jurnal Sejarah Vol 1(1), tahun 2017:121-146, Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Uni Soviet dalam diplomasinya melihat kata *Druzhba* (Persahabatan) sebagai inti dari hubungan antar pihak karena kata persahabatan mengandung makna seperti kejujuran, kesetiaan, dan tidak mencampuri urusan internal pihak lain, hal mana harus dijunjung tinggi dalam pergaulan internasional. Karenanya sesungguhnya menjaga hubungan baik menjadi inti dalam berhubungan dengan Uni Soviet. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Uni Soviet dalam bidang politik diwujudkan dengan bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet kepada Indonesia pada saat pembebasan Irian Barat. Uni Soviet menjadi mediator dalam perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda terkait dengan Irian Barat. Selain itu, hubungan politik antara Indonesia dengan Uni Soviet terlihat dari bantuan persenjataan dan militer. Uni Soviet juga membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya. Misalnya, pada tahun 1947-1948 dalam sidang ECOSOC diajukan sejumlah usulan untuk diakui kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi Delhi, Januari 1949 Uni Soviet mengecam Agresi Militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
2. Penelitian Pesona Sadewa dan Falhan Hakiki (2022) yang berjudul “Dinamika Kebijakan politik Luar Negeri Indonesia melalui Gerakan Non Blok Tahun 1947-1966”. Jurnal Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI Volume 11 No 1, halaman 13-28 ISSN. 2830-5728. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia merupakan prinsip yang muncul berawal dari adanya pertentangan kedua belah pihak antara Amerika dengan Uni Soviet. Indonesia menjunjung tinggi perdamaian dan menolak keras adanya penjajahan. Hal ini mendapatkan dukungan dari pihak Uni Soviet yang merupakan negara Blok Timur sehingga mendorong terjadinya hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan Uni Soviet pasca perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
3. Penelitian Mulyadi, S. M. (2017) yang berjudul “Kerjasama Ekonomi dan Militer Uni Soviet-Indonesia, 1955-1965” (Doctoral dissertation), Universitas Gadjah Mada) Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Volume 1, Nomor 2, halaman 28-

39. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pada masa Presiden Sukarno, Indonesia menjadi salah satu arena perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara besar tersebut memiliki kepentingan yang sama, yaitu menyebarkan pengaruhnya. Seiring berjalannya waktu, perang dingin bukan lagi hanyalah sebuah perang ideologi, tetapi menjadi perang kecanggihan teknologi dan industri. Indonesia menjadi salah satu negara penikmat adanya peperangan tersebut, meskipun konsekuensi yang harus diambil oleh Indonesia sangat besar yaitu hutang yang melampaui batas kemampuan pembayaran. Di pertengahan 1950an Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan Uni Soviet. Dari kredit hingga hibah mengalir dari Uni Soviet ke Indonesia untuk pembangunan industri dan militer. Tapi, bantuan tersebut tidak banyak menghasilkan kemakmuran dan pertumbuhan industri. Begitu pula peralatan militer yang dibeli dari Uni Soviet secara kredit. Penelitian ini membahas mengenai hubungan politik ekonomi antara Indonesia dan Uni Soviet dalam kurun waktu 1955 sampai 1965. Tema ini dirasa perlu dikaji untuk mengetahui seberapa bergunanya hutang dari Uni Soviet untuk pembangunan Indonesia.

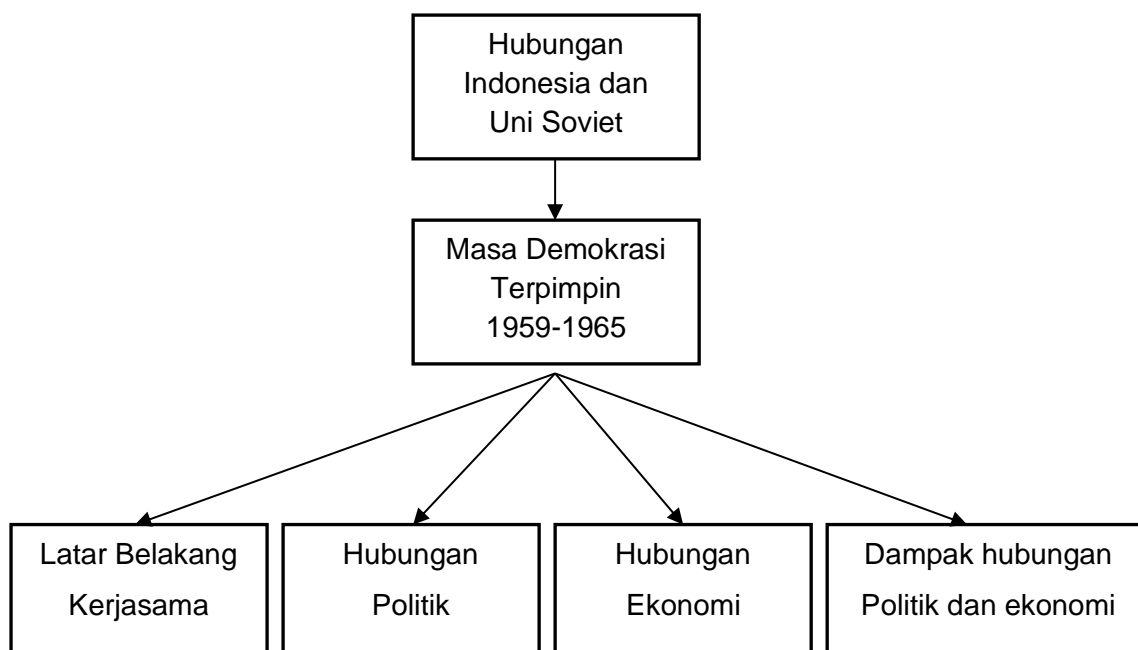
Berdasarkan kajian relevan di atas, maka persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah persamaannya terletak pada topik pembahasan utama yaitu hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Sedangkan perbedaannya bahwa pada penelitian terdahulu pembahasan terkait dengan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet terfokus pada militer sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas lebih rinci terkait dengan hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Soviet.

H. Kerangka Berpikir

Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sudah terjalin sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Uni Soviet pada saat itu memandang bahwa Indonesia memiliki kondisi yang memprihatinkan dimana rakyat masih dibawah tekanan dari Belanda. Uni Soviet yang merupakan negara berasaskan Marxisme-leninisme beranggapan bahwa kaum sosialis harus diutamakan. Kepentingan rakyat harus diprioritaskan diatas kepentingan yang lainnya, sehingga ketika melihat rakyat biasa menderita, Uni Soviet sangat menentang adanya ketidakadilan dan kolonialisme. Hal inilah yang membuat Uni Soviet mendukung Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kedekatan

hubungan Indonesia dengan Uni Soviet terus menguat. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin membuat Uni Soviet semakin tertarik dengan Indonesia, sehingga pada masa itu, Perdana Menteri Uni Soviet yaitu Nikita Krushev mengundang Presiden Soekarno ke Moscow untuk menjalin persahabatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan diplomatik antara Uni Soviet dengan Indonesia terjadi sejak sebelum kemerdekaan. Hubungan ini dilatar belakangi adanya berbagai kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Bentuk kerjasama yang terjalin diantaranya adalah politik dan ekonomi. Hubungan politik dan ekonomi tentunya membawa dampak bagi kedua negara. Bagi Indonesia, adanya hubungan politik dengan Uni Soviet dapat meningkatkan kondisi pertahanan dan keamanan. Sedangkan bagi Uni Soviet adanya hubungan politik ini dapat menjadi salah satu upaya mendapatkan dukungan bagi Uni Soviet pada perang dingin yang terjadi. Pada bidang ekonomi akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dan kegiatan ekspor dan impor bagi kedua negara. Dari uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

I. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi

kesalahpahaman atau kesimpangsiuran maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian Historis
2. Objek Penelitian Hubungan Indonesia dan Uni Soviet Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965
3. Subjek Penelitian Buku-buku, literatur, dan sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.
4. Tempat Penelitian Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, Perpustakaan Daerah Metro,
5. Waktu Penelitian Tahun 2023